

**ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA APARATUR
TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Survey pada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)**

Nisa Lestaringrum ¹⁾

Aris Eddy Sarwono ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

^{1,2,3)} Program Sudi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾ nisalestariningrum1212@gmail.com

ABSTRACT

The research was conducted on the local government apparatus Wonogiri district. This study aims to determine the effect on organizational commitment, regional financial management and apparatus performance on good governance. The type of data used in this research is quantitative data, the data source used is primary data. The population in this study were all local government officials in Wonogiri district. The number of samples in this study were 102 respondents. The sampling technique used purposive sampling. The data collection method used was a questionnaire. The data analysis technique used is descriptive statistics, validity test, reliability test, classical assumption test and multiple linear regression. The results show that the variable of organizational commitment, regional financial management and apparatus performance have a significant positive effect on good governance.

Keyword: Organizational Commitment, Regional Financial Management, Performance of Local Government Officials, Good Governance

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Keberhasilan suatu pemerintahan tidak akan lepas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencapai tujuannya. *Good governance* mencerminkan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan yang bertanggungjawab dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. *Good governance* dapat dikatakan lemah karena masih adanya kasus korupsi di Indonesia yang terbilang tinggi. Masalah-masalah tersebut yang menyebabkan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. *Good governance* sangat diperlukan karena merupakan suatu cara bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.

Good governance ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. *Good governance* muncul akibat semakin banyak permasalahan, seolah menegaskan bahwa tidak adanya iklim pemerintah yang baik dan didorong dalam reformasi sektor publik (Iswahyudi,

Triyuwono dan Achsin, 2016).

Good governance merupakan sebuah inovasi dalam sistem pemerintahan saat ini. *Good governance* dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan (Syafriyon, Zirman dan Azhari, 2015). *Good governance* yang baik akan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

Komitmen dalam organisasi terbentuk karena tingginya komitmen karyawan dalam organisasi untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tempat mereka bekerja (Rentalangi, Affan, Deviyanti dan Sari, 2017). Komitmen organisasi menggambarkan keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi dan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk loyalitas individu pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara komitmen organisasi dengan *good governance* adalah apabila semakin baik komitmen organisasi maka akan mendorong terwujudnya *good governance* yang baik pula.

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan yang sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu tata kelola pemerintah karena dapat mencerminkan kemajuan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan tanggungjawab. Keterkaitan antara pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance* adalah apabila pengelolaan keuangan daerah baik maka akan mendorong terwujudnya *good governance* dengan baik pula.

Kinerja aparatur adalah gambaran atas keberhasilan seluruh pencapaian aktivitas pelaksana pemerintah yang telah memperoleh wewenang yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat menunjang tinggi inovasi dalam bekerja agar tercapai keberhasilan kinerja dalam mewujudkan tujuan organisasi. Keterkaitan antara kinerja aparatur dengan *good governance* adalah apabila kinerja aparatur baik maka akan mendorong terwujudnya *good governance* yang baik pula.

Berdasarkan kutipan jatengprov.go.id menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik makin menjadi *style*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Republik Indonesia. Kabupaten Wonogiri termasuk salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan WTP. Penyerahan penghargaan WTP dilakukan saat Rapat Koordinasi *Kantor Wilayah* Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah se Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi capaian tersebut, dia memberi peringatan kepada kepala daerah untuk mewaspadai celah korupsi di era digital. Ada perbaikan kualitas membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yang makin hari makin menjadi *style*, seolah kalau belum memperoleh WTP punya beban tinggi. Penghargaan tersebut sekaligus untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, akan terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, berdasarkan website solopos.com menyatakan bahwa hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kabupaten Wonogiri memperoleh predikat BB pada Tahun 2018 yang meningkat dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 mendapat predikat B. Dengan mendapatkan predikat BB berarti tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup memadai. Sementara pada tataran pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah menunjukkan hasil yang baik. Opini WTP dan hasil evaluasi SAKIP yang baik dapat menjadikan tata kelola pemerintahan pada suatu kabupaten yang baik pula.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa hasil uji analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2017), komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance* (Rentalangi, dkk 2017). Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Dhiyavani, 2017), (Wiguna dan Putra, 2017), pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2017) dan (Wibowo dan Indeswari, 2019). Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Dhiyavani, 2017), kinerja aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2017) dan (Wibowo dan Indeswari, 2019). Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna dan Putra, 2017) yang menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 1) Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap *good governance*. 2) Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance*. 3) Untuk menganalisis pengaruh kinerja aparatur terhadap *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa pada umumnya semua pemegang saham yang termasuk dalam level manajemen memiliki kepentingan tersendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam sektor publik, hubungan keagenan dilihat sebagai hubungan pendelegasian. Hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekutif, *legislative* dan *public (voters)*. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai *expert agent* untuk melaksanakan suatu tindakan (*action*). Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau *public*, karena mereka adalah representasi dari *public* yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana *public*. *Public* adalah *principal* bagi eksekutif dan *legislative*, dikatakan bahwa *public* disebut juga *the ultimate principle* (Asmara, 2010).

Good Governance

Good governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan

karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip seperti partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan saling keterkaitan (Mardiasmo, 2009: 25). Tata kelola pemerintahan berdasarkan suatu konsep dalam pemerintahan yang mengacu pada proses pencapaian putusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2007). Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik, dengan begitu maka pemerintah daerah akan menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan *good governance* di daerahnya. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan bekerja secara maksimal karena keinginannya akan kesuksesan organisasi tempat dimana mereka bekerja. Dengan adanya komitmen yang kuat, mereka akan bekerja lebih keras, ikhlas dan memiliki rasa peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja mereka karena visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih yang mereka berikan pada *good governance* (Syafri, 2015).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik karena pengelolaan keuangan daerah dapat mencerminkan kemajuan suatu daerah tersebut.

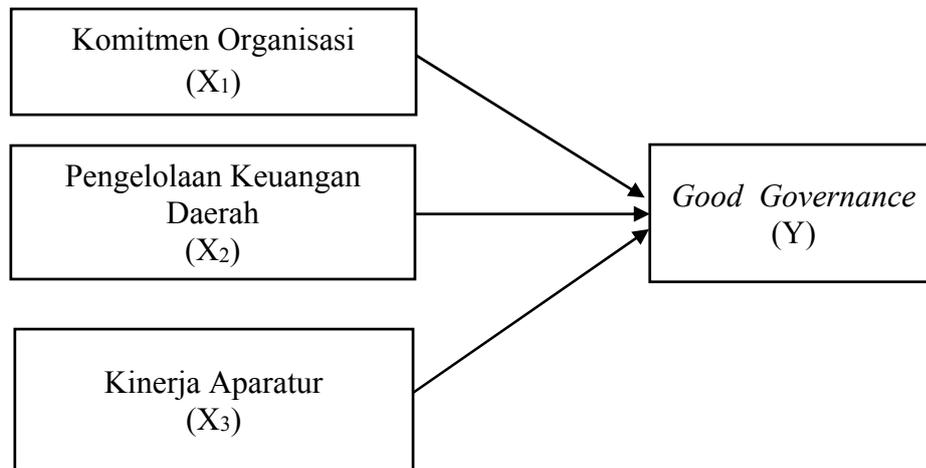
Dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sari, 2017).

Kinerja Aparatur

Kinerja aparatur adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Bastian, 2010: 320). Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah atau kinerja aparatur pemerintah yang baik dan handal yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif. Berkaitan dengan hal tersebut maka karakteristik *good governance*, diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*. Salah satu cara untuk membentuk

sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2012: 251).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap *good governance*.

H₂: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*.

H₃: Kinerja aparatur berpengaruh terhadap *good governance*.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Alasan pemilihan objek di Kabupaten Wonogiri karena Kabupaten Wonogiri termasuk dalam salah satu kabupaten yang menerima penghargaan WTP di Provinsi Jawa Tengah dan hasil evaluasi SAKIP mendapat predikat BB yang meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh predikat B hal tersebut yang dapat mencerminkan terwujudnya *good governance*.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2015: 13). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa tanggapan responden dari aparatur pemerintah daerah yang menjabat sebagai kepala kantor dinas, badan, sekretariat, kecamatan dan staf bagian keuangannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 26). Sumber data ini diperoleh dari hasil pembagian kuesioner yang diberikan kepada kepala kantor dinas, badan, sekretariat, kecamatan dan staf bagian keuangannya.

Teknik dan Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dicarikan kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparaturpemerintah daerah yang bekerja di Kabupaten Wonogiri sebanyak 1.991 orang.

Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 118). Responden yang diambil yaitu kepala kantor dinas, badan, sekretariat, kecamatan dan staf bagian keuangan. Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 102 responden.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu (Sugiyono 2015: 124). Kriteria yang digunakan yaitu:

1. Responden adalah aparatur pemerintah daerah yang menjabat sebagai kepala kantor dinas, badan, sekretariat dan kecamatan.
2. Responden adalah aparatur pemerintah daerah yang menjabat sebagai staf bagian keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah 5 poin *skala likert* dengan memberikan skor 1 sampai dengan 5 *skala likert* merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan (Sugiyono, 2015: 134).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2015: 333). Analisis data ini menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 21, adapun analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas), analisis regresi linier berganda, uji parsial (t), uji ketepatan model (F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Instrumen komitmen organisasi (X_1) sebanyak 6 butir pernyataan, pengelolaan keuangan daerah (X_2) sebanyak 5 butir pernyataan, kinerja aparatur (X_3) sebanyak 6 butir pernyataan dan *good governance* (Y) sebanyak 9 butir pernyataan melalui uji validitas dengan menggunakan korelasi *person* menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan $p(0,000) < 0,05$.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel yaitu komitmen organisasi (X_1), pengelolaan keuangan daerah (X_2), kinerja aparatur (X_3) dan *good governance* (Y) dinyatakan reliabel ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* (0,896; 0,837; 0,926 dan 0,922) $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan bantuan *software* SPSS 21 didapatkan hasil bahwa semua instrumen dalam penelitian ini lolos dalam uji normalitas dan multikolinearitas, sehingga semua instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Normalitas	<i>p-value</i> 0,097 $> 0,05$	Residual normal
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,413; 0,639; 0,560) $> 0,10$ <i>VIF</i> (2,421; 1,564; 1,785) < 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>t-test</i>	<i>Sig.</i>
<i>Constant</i>	9,546	2,468	0,015
Komitmen Organisasi	0,383	2,173	0,032
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,502	2,879	0,005
Kinerja Aparatur	0,356	2,077	0,040
R^2	0,403		
<i>Adj. R^2</i>	0,385		
<i>F-test</i>	22,086		0,000

Sumber: DataPrimer diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,546 + 0,383 X_1 + 0,502 X_2 + 0,356 X_3$$

Berdasarkan analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap *good governance* (Y) di Kabupaten Wonogiri adalah variabel pengelolaan keuangan daerah (X₂) karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 0,502 diantara koefisien regresi variabel bebas lain yaitu komitmen organisasi (X₁) sebesar 0,383 dan kinerja aparatur (X₃) sebesar 0,356.

Uji Parsial (t)

Berdasarkan analisis regresi dapat disajikan hasil uji sebagai berikut:

1. Uji pengaruh komitmen organisasi (X₁) terhadap *good governance* (Y)
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,173 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi (X₁) terhadap *good governance* (Y).
2. Uji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance* (Y)
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,879 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah (X₂) terhadap *good governance* (Y).
3. Uji pengaruh kinerja aparatur (X₃) terhadap *good governance* (Y)
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,077 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara kinerja aparatur (X₃) terhadap *good governance* (Y).

Uji Ketepatan Model (F)

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 22,086 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu komitmen organisasi (X₁), pengelolaan keuangan daerah (X₂), kinerja aparatur (X₃) terhadap variabel terikat yaitu *good governance* (Y), model regresi linier berganda yang digunakan sudah tepat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Ajusted R² Square* = 0,385 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu komitmen organisasi (X₁), pengelolaan keuangan daerah (X₂), kinerja aparatur (X₃) terhadap variabel terikat yaitu *good governance* (Y) mempunyai pengaruh yang nyata sebesar 38% sedangkan sisanya (100% - 38%) = 62% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Good Governance*

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,173 dengan *p-value* sebesar 0,032 < 0,05 maka H₀ ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas komitmen organisasi (X₁) dengan variabel terikat yaitu *good governance* (Y). Hipotesis 1 terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka *good governance*

akan semakin baik. Oleh karena itu komitmen organisasi yang kuat sangat diperlukan untuk mencapai *good governance*. Apabila komitmen organisasi rendah maka dapat mengakibatkan hambatan dalam *good governance*, karena komitmen organisasi adalah suatu cara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2017), komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance* (Rentalangi, dkk 2017).

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap *Good Governance*

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,879 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas komitmen organisasi (X_2) dengan variabel terikat yaitu *good governance* (Y). Hipotesis 2 terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka *good governance* akan semakin baik pula. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mencapai *good governance*. Apabila pengelolaan keuangan daerah rendah maka dapat mengakibatkan hambatan dalam *good governance*, karena pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan yang sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu tata kelola pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Dhiyavani, 2017), (Wiguna dan Putra, 2017), pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2017) dan (Wibowo dan Indeswari, 2019).

3. Pengaruh Kinerja Aparatur terhadap *Good Governance*

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,077 dengan *p-value* sebesar $0,040 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas kinerja aparatur (X_3) dengan variabel terikat yaitu *good governance* (Y). Hipotesis 3 terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*. Hal ini berarti bahwa semakin baik kinerja aparatur maka *good governance* akan semakin baik pula. Oleh karena itu kinerja aparatur sangat diperlukan untuk mencapai *good governance*. Apabila kinerja aparatur rendah maka dapat mengakibatkan hambatan dalam *good governance*, karena kinerja aparatur adalah suatu bentuk tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi, dalam menilai baik atau tidak *good governance* dalam suatu pemerintahan dapat dilihat dari kinerja aparatur pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*

(Dhiyavani, 2017), kinerja aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2017) dan (Wibowo dan Indeswari, 2019).

KESIMPULAN

Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen organisasi maka *good governance* akan terwujud. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka *good governance* akan terwujud. Kinerja aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja aparatur maka *good governance* akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Dasussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 2. Juli 2010. Hal 155-172.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Iswahyudi, Aries, I. Triwahyuno dan M. Achsin. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Jensen, M. C dan Meckling. W. H. 1976. The Agency Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Rantelangi, Cornelius, N. Affan, D. R. Deviyanti, dan W. I. R Sari. 2017, The Influence of Organizational Commitment, Auditor Independence, Internal Control, and Ethical Leadership in Good Governance and Organizational Performance. *Advances in Economics, Bussines and Management Research (AEBMR)*, Faculty of Economics and Bussiness, Mulawarman University, Indonesia.
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Nirmala W. 2017. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon*, Vol.4 No. 1 (Februari) 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrion, Fandra Y. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good Governance. *JOM Fekon* Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.
- Wiguna, Meilda dan A. A Putra. 2017. Analysis of Factors That Affect Good Governance Implementation (Empirical Study on Government of Indragiri Hilir Regency). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 10, No. 2, November 2017, 70-78. Universitas Riau.
- <http://jatengprov.go.id/publik/tata-kelola-pemerintah-yang-baik-makin-jadi-style/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.
- <https://m.solopos.com/peringkat-ke-4-akuntabilitas-kinerja-pemkab-wonogiri-ungguli-solo-dan-semarang-973258>. Diakses pada 09 Februari 2020.